

## **PENGELOLAAN BELANJA DAERAH DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN SIGI**

**Ade Mulyani,<sup>1</sup> Rudin M,<sup>2</sup> Muhammad Darma Halwi<sup>3</sup>**

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu Jl.  
DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi  
Tengah

Email: [rudin.ternate@gmail.com](mailto:rudin.ternate@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan belanja daerah serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sigi selama periode 2021–2024. Fokus kajian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta identifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan data sekunder dari BPS, laporan keuangan daerah, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur belanja daerah Kabupaten Sigi didominasi oleh belanja operasi, sedangkan porsi belanja modal relatif kecil meskipun menunjukkan tren peningkatan di tahun terakhir. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang stabil namun moderat, dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar 3–3,5% setelah masa pemulihan pascabencana dan pandemi. Ditemukan pula bahwa efektivitas pengelolaan belanja daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, serta penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola fiskal. Optimalisasi belanja publik yang produktif, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan pertanian, berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Belanja Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten Sigi.

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze regional expenditure management and its contribution to economic growth in Sigi Regency during the 2021–2024 period. The research focuses on the planning, implementation, and supervision of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), while identifying supporting and inhibiting factors. Using a descriptive method with both qualitative approaches, this study draws on secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS), local government financial reports, and relevant fiscal regulations. The results reveal that Sigi Regency's regional expenditure structure is dominated by operational spending, while capital expenditure remains relatively small despite a rising trend in the final year. This composition has resulted in stable but moderate economic growth, averaging around 3–3.5% following post-disaster and post-pandemic recovery. The study finds that the effectiveness of regional spending is strongly influenced by institutional capacity, human resource quality, and adherence to good governance principles. Productive public spending especially in infrastructure, education, and agriculture has significant potential to accelerate sustainable local economic growth.*

**Keywords:** *Regional Expenditure, Public Financial Management, Economic Growth, Sigi Regency.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pengelolaan belanja daerah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan serta potensi wilayahnya. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan belanja daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.<sup>1</sup>

Secara empiris, berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah,

---

<sup>1</sup> Aithan, I., Frinaldi, A., Putri, N.E., & Asnil (2025). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Berdasarkan APBD Tahun 2024*. Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern, Vol. 9, No. 2, Mei 2025.

khususnya terkait dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal yang bersifat produktif. Kondisi ini berpotensi membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan kerja. Padahal, belanja daerah yang dikelola secara efisien dan tepat sasaran diharapkan mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kabupaten Sigi sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah juga menghadapi tantangan serupa. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sigi selama periode 2021–2024, total belanja daerah menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan komposisi belanja yang masih didominasi oleh belanja operasi. Sementara itu, belanja modal sebagai instrumen investasi publik mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengelolaan belanja daerah tersebut telah diarahkan untuk mendukung peningkatan kapasitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>2</sup>

Regulasi nasional seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah memberikan panduan teknis terkait tahapan pengelolaan anggaran daerah. Namun demikian, efektivitas implementasinya sangat tergantung pada kapasitas kelembagaan dan komitmen dari masing-masing daerah dalam menerapkannya secara konsisten. Dalam kerangka teori, pengelolaan belanja daerah dapat dikaji melalui perspektif Teori Keuangan Publik (Musgrave), di mana fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi pemerintah

---

<sup>2</sup> Amri, H.A.H., (2022). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010–2020*. (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin

menjadi dasar dalam memahami intervensi fiskal terhadap dinamika ekonomi (Putra et al., 2025)

Selain itu, Teori Pertumbuhan Endogen (Romer & Lucas) menyatakan bahwa investasi publik pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan berkontribusi langsung terhadap produktivitas dan pertumbuhan jangka panjang (Ir & Tarumingkeng, 2024). *Good governance* sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel juga menjadi faktor kunci dalam mewujudkan belanja daerah yang berdaya guna. Penerapan prinsip ini dalam manajemen keuangan daerah diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik serta efisiensi belanja.<sup>3</sup>

Di sisi lain, perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi yang diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan dinamika yang berfluktuasi. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi *Covid-19*, perekonomian Kabupaten Sigi mulai pulih pada tahun-tahun berikutnya. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi masih tergolong moderat dan belum menunjukkan akselerasi yang signifikan seiring dengan meningkatnya belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi permasalahan dalam aspek pengelolaan belanja daerah, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran. Pengelolaan belanja daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*output* dan *outcome*) dapat menyebabkan belanja publik

---

<sup>3</sup> Anugrahwaty, N., (2022). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Mamuju* (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin.

kurang efektif dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif di daerah. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas koordinasi antar perangkat daerah juga menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi kualitas pengelolaan belanja daerah.

Secara teoretis, belanja daerah dipandang sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan aktivitas ekonomi lokal. Namun, temuan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten mengenai pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagian penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan, sementara penelitian lainnya menunjukkan pengaruh yang lemah atau tidak signifikan. Selain itu, sebagian besar penelitian masih dilakukan pada tingkat nasional atau provinsi, sehingga kajian yang secara spesifik menelaah pengelolaan belanja daerah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Sigi, masih relatif terbatas.<sup>4</sup>

Berdasarkan kondisi empiris dan teoretis tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Sigi dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi bagaimana belanja daerah dikelola, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaannya, serta sejauh mana belanja daerah berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan strategi pengelolaan belanja daerah yang

---

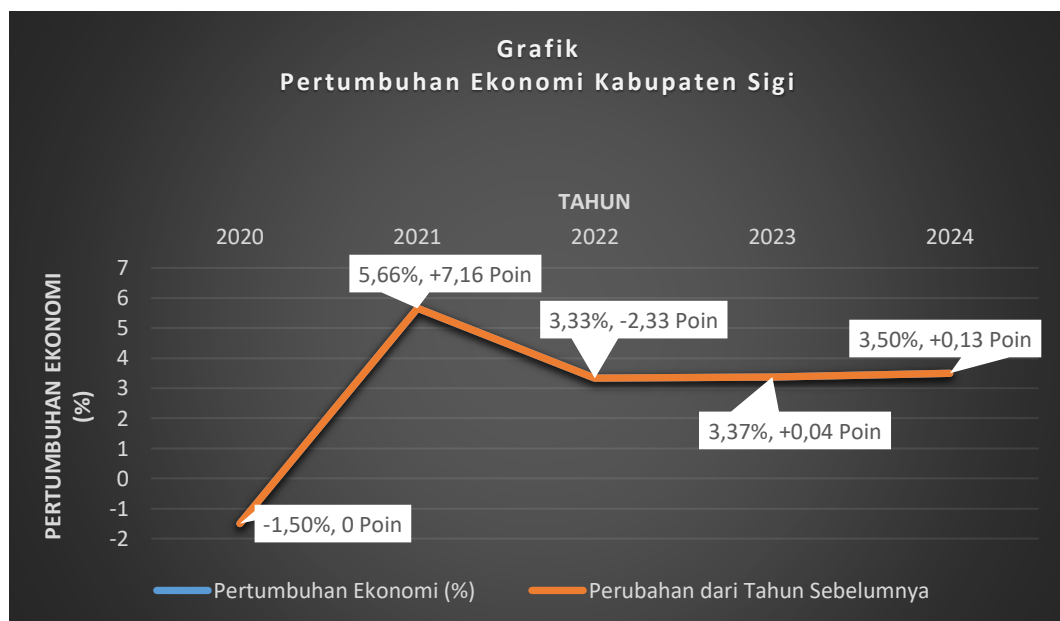
<sup>4</sup> Asia, R.P., dkk (2024). Pengaruh PDRB Dan Usia Produktif Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Era Bonus Demografi. "*Arsyad 2010*". INDEPENDENT: Journal Of Economics. Volume 04 Nomor 02, 2024

lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kinerja ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tabel 1.1

Realisasi Belanja Daerah menurut jenis belanja 2021-2024  
dan Pertumbuhan Ekonomi 2020-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi, Hasil Diolah Peneliti



Sumber : Hasil Diolah Peneliti 2025

Gambar 1.1

Grafik Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sigi

Data tersebut menunjukkan tren belanja daerah Kabupaten Sigi yang berfluktuasi sepanjang tahun 2021–2024, namun secara umum mengalami kenaikan di akhir periode. Pada tahun 2021, belanja daerah dengan porsi terbesar berasal dari belanja operasi. Tahun 2022, jumlah belanja sedikit menurun pada belanja operasi, dan belanja modal mengalami kenaikan yang cukup berarti. Kondisi

ini menunjukkan adanya penyesuaian alokasi anggaran pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan pengeluaran rutin dan investasi pembangunan.

Pada tahun 2023, total belanja meningkat yang ditandai dengan lonjakan belanja modal serta belanja tak terduga yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya.<sup>5</sup> Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak serta upaya memperkuat pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Pada tahun 2024 peningkatan belanja daerah hampir semua komponen, terutama belanja operasi dan belanja transfer, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. Sementara pada tabel dan grafik untuk pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Sigi memperlihatkan dinamika yang cukup jelas, dimana tahun 2020 mengalami kontraksi kemudian berhasil bangkit kembali pada tahun 2021 hingga stabil di tahun 2022-2024.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten sigi ?
2. Bagaimana kontribusi belanja daerah pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sigi?

---

<sup>5</sup> Astuti, I. (2024). *Analisis peluang dan tantangan praktik desentralisasi penguatan otonomi di Kabupaten Kediri*.

### **C. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data secara valid dan sistematis, sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara berurutan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan di lapangan, hingga penyusunan hasil penelitian. Seluruh temuan dirangkai dalam bentuk uraian yang runtut, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pengelolaan belanja daerah, hambatan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sigi. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.<sup>6</sup>

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan varian deskriptif murni. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual suatu fenomena, peristiwa, atau gejala sosial sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.<sup>7</sup> Sementara pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat naratif, bukan numerik. Dalam varian deskriptif murni, penelitian hanya berfokus pada penggambaran kondisi atau fakta yang ada, tanpa bertujuan mengembangkan teori baru atau menguji hipotesis. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sigi,

---

<sup>6</sup> Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

<sup>7</sup> Sugiyono. (2017).



Provinsi Sulawesi Tengah. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Sigi memiliki karakteristik pengelolaan belanja daerah yang dinamis dan sedang berada dalam proses pemulihan pascabencana, sehingga sesuai dengan fokus penelitian.

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **Sejarah Kabupaten Sigi**

Kabupaten Sigi merupakan kabupaten dengan cakupan hutan hampir 70% dari luas wilayahnya. Kabupaten Sigi merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Donggala yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Sigi resmi terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008. Alasan utama perjuangan pembentukan Kabupaten Sigi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan yang lebih dekat, efektif, dan efisien. Selain itu, pertimbangan orbitasi pemerintahan, luas wilayah, serta permasalahan sosial-ekonomi mendorong masyarakat setempat untuk memiliki daerah otonom sendiri.<sup>8</sup>

Nama "Sigi" dipilih karena memiliki makna historis dari kerajaan Sigi yang gigih melawan penjajahan, sekaligus berarti "kekuatan bersama" dalam literatur lama bahasa Indonesia. Upaya dan perjuangan pembentukan Kabupaten Sigi semakin menguat dengan terbentuknya Angkatan Muda Sigi (AMS) yang diketuai oleh bapak Djuanda Lamakarate, BA., yang tidak kalah pentingnya di daerah dibentuk Forum Masyarakat Sigi (FORMASI) yang diketuai bapak Mohamad Irwan Lapatta, S.Sos., M.Si sebagai wadah

---

<sup>8</sup> Supartoyo, Yesi Hendriani; Tatu, Jen; and Sendouw, Recky H. E. (2013) "The Economic Growth and the Regional Characteristics: The Case of Indonesia," *Bulletin of Monetary Economics and Banking: "Todaro dan Smith (2015)"* Vol. 16: No. 1

komponen inti pendukung Forum Komunikasi Pemekaran Kabupaten Sigi (FKPKS).

Pada awal tahun 2000-an, pemekaran wilayah semakin intensif. Tahun 2002 dibentuk Kecamatan Pipikoro (pemekaran Kulawi), dan tahun-tahun berikutnya lahir beberapa kecamatan baru seperti Dolo Selatan, Gumbasa, Tanambulava, dan Kulawi Selatan. Tahun 2007–2008 kembali lahir lima kecamatan tambahan, seperti Lindu, Marawola Barat, Kinovaro, Dolo Barat, dan Nokilalaki. menjelang pembentukan Kabupaten Sigi, wilayahnya telah terdiri dari 15 kecamatan. Aspirasi pembentukan daerah otonomi baru di kawasan selatan Donggala mulai menguat sejak 1999.<sup>9</sup>

Tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda membentuk Forum Komunikasi Pemekaran Kabupaten Sigi (FKPKS) pada 10 November 1999. Forum ini menjadi wadah utama perjuangan pembentukan Kabupaten Sigi, menghimpun dukungan dari berbagai elemen, termasuk tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan. Setelah peresmian Kabupaten Sigi, selanjutnya pelantikan pejabat Bupati Sigi bapak Drs. Hidayat, M.Si oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2009. Sejarah panjang pembentukan Kabupaten Sigi menunjukkan semangat masyarakat dalam memperjuangkan kemandirian daerah, yang menjadi dasar penting bagi pengelolaan belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan ditetapkannya undang-undang nomor 27 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa pembentukan kabupaten sigi bukanlah tujuan akhir dari perjuangan FKPKS dan masyarakat sigi, melainkan sebagai jembatan emas untuk mengantar masyarakat

---

<sup>9</sup> *Negara: Peluang Dan Tantangan Untuk Transisi Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia*. Nusantara Hasana Journal, Volume 4 No. 9 (Februari 2025), Page: 39-51

yang berdaya saing dan sejahtera. Berikut adalah gambar tugu Kabupaten Sigi yang terletak di Desa Sigi Biromaru :



Motto: Mareso masagena (Bahasa Kaili)  
Arti: Kerja keras demi meraih kesejahteraan

## **1. Analisis pengelolaan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sigi**

### **a. Kondisi Umum Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Sigi**

Kabupaten Sigi sebagai daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi tantangan fiskal yang kompleks, terutama karena struktur pendapatan daerahnya masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menyebabkan kemampuan fiskal daerah masih terbatas untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bersifat strategis. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar belanja publik dapat diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sigi, proporsi terbesar belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi, khususnya belanja pegawai. Dominasi tersebut menggambarkan sebagian besar APBD atau belanja daerah masih diarahkan untuk mendukung keberlangsungan birokrasi yaitu pembiayaan rutin pemerintahan, meskipun pengeluaran untuk barang dan jasa juga meningkat di tahun 2021. Meskipun arah pembiayaan tersebut bukan pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, namun menunjukkan adanya penguatan pada penyediaan layanan dasar.<sup>10</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat upaya nyata untuk meningkatkan porsi belanja modal. Komponen belanja modal menunjukkan tren adanya dinamika, dengan porsi terbesar

---

<sup>10</sup> Putra, E., Pratama, I.N., Ningrum, S.D.S., Fitrianingsih, Lestari, N., Azhari, M.A., Aslan, M., Agung Putra Sarkila, A.P., & Putri Kartika, P., (2025). *Implementasi Kebijakan Fiskal Hijau Dalam Anggaran Pendapatan Be*

dialokasikan pada pembangunan di sektor infrastruktur publik seperti pembangunan jalan, jembatan, jaringan, irigasi, serta gedung dan bangunan juga sarana pendidikan serta Kesehatan. Penurunan pada 2024 bisa diartikan sebagai penyesuaian fiskal, namun tetap dalam koridor menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Pada komponen belanja tak terduga terjadi fluktuasi, yang menunjukkan adanya respons fiskal terhadap situasi kedaruratan atau kondisi tidak terduga, seperti bencana alam yang memang sering melanda di Kabupaten Sigi. Sementara pada komponen belanja transfer terjadi peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa/kelurahan dengan tren meningkat pada tahun 2021 ke tahun 2024. Hal ini menandakan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap penguatan fiskal di tingkat desa sebagai ujung tombak pembangunan.<sup>11</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Sigi selama periode 2021–2024 mengalami perkembangan yang cenderung meningkat meskipun bersifat fluktuatif antar tahun. Berdasarkan hasil pengolahan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tren rata-rata perkembangan belanja daerah Kabupaten Sigi selama periode tersebut mencapai 37,11%. Peningkatan belanja daerah ini terutama dipengaruhi oleh dominasi belanja operasi yang setiap tahun menempati porsi terbesar dalam struktur APBD. Belanja operasi digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial, yang berfungsi menjaga

---

<sup>11</sup> Pemerintah Kabupaten Sigi. (2023). *“Profil Kabupaten Sigi”*. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi

keberlangsungan pelayanan publik. Sementara itu, belanja modal menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun tertentu sebagai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan publik.

Secara umum, tren peningkatan belanja daerah mencerminkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Sigi dalam memperluas peran fiskal daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun demikian, struktur belanja yang masih didominasi oleh belanja operasi menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah belum sepenuhnya diarahkan pada belanja yang bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang. Implikasi dari pola belanja daerah adalah bahwa Kabupaten Sigi masih perlu menyeimbangkan antara belanja rutin (operasi) dan belanja produktif (modal) agar pengelolaan belanja daerah lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan dominasi belanja pegawai perlu diimbangi dengan peningkatan investasi publik pada infrastruktur, sektor pertanian, dan pariwisata yang menjadi basis perekonomian daerah. Dengan demikian, alokasi belanja dapat memberikan *multiplier effect* yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>12</sup>

Dari sisi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sigi telah menerapkan prinsip *value for money* dalam pelaksanaan anggaran daerah. Artinya, setiap pengeluaran daerah harus memberikan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat dengan biaya yang efisien. Implementasi prinsip ini masih menghadapi kendala, terutama

---

<sup>12</sup> Pangemanan, S. (2024). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dimoderasi Budaya Organisasi* (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin.

pada aspek perencanaan berbasis kinerja dan evaluasi hasil program. Namun demikian, arah kebijakan fiskal daerah telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan efektivitas belanja publik melalui penguatan sistem informasi keuangan daerah (SIPD) dan evaluasi kinerja berbasis indikator pembangunan daerah.

#### **b. Hubungan Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam konteks Kabupaten Sigi, peningkatan belanja daerah dalam periode 2021-2024 terbukti memiliki korelasi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi selama periode 2020–2024 mengalami dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Sigi mengalami kontraksi akibat dampak pandemi Covid-19. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, perekonomian daerah mulai menunjukkan pemulihan yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi positif.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil perhitungan, tren rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi selama periode 2020–2024 tercatat sebesar 2,87%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pemulihan ekonomi pascapandemi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi masih tergolong moderat dan belum mengalami akselerasi yang signifikan.<sup>14</sup>

Pertumbuhan ekonomi pada periode 2020–2024 mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi daerah telah kembali berjalan, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan kenaikan belanja daerah yang cukup tinggi pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah belum secara optimal menghasilkan dampak

---

<sup>13</sup> Oates, W. E. (1999). *An Essay on Fiscal Federalism*. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.

<sup>14</sup> Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi

langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2021 menunjukkan tren pemulihan yang cukup stabil, didorong oleh perbaikan aktivitas ekonomi di sektor konstruksi kembali tumbuh., mobilitas masyarakat membaik, serta pemulihan pada sektor perdagangan dan jasa.

Pada tahun 2022 pertumbuhan masih positif, tetapi melambat. Hal ini dipengaruhi normalisasi ekonomi dan tekanan inflasi. Meskipun angka pertumbuhan ekonomi masih moderat, namun pertumbuhan berjalan dengan stabil di tahun 2023, dan menunjukkan pemulihan berkelanjutan meski tanpa lonjakan besar. Keberlanjutan tren positif ini menunjukkan bahwa belanja publik memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas ekonomi daerah. Hingga di tahun 2024 Proyeksi pertumbuhan sedikit meningkat, didukung sektor pertambangan, transportasi, dan real estate.<sup>15</sup>

Haga,et,.al (2024) mendukung temuan ini, dengan menyimpulkan bahwa peningkatan belanja daerah yang terarah pada sektor produktif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja modal menjadi komponen belanja yang paling strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, di Kabupaten Sigi, porsi belanja modal masih relatif rendah dibandingkan dengan total APBD, sehingga efek penggandanya terhadap pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya optimal.

### **c. Analisis Regulasi dan Implementasi Kebijakan**

Kerangka regulasi pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Sigi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019, dan

---

<sup>15</sup> Kurniawan, A. (2025). *Apakah Inflasi, Pendapatan Pajak Daerah, dan Pengeluaran Pemerintah Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi? Analisis Makroekonomi di Pulau Jawa*



Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan pedoman komprehensif tentang tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Tujuannya adalah menciptakan tata kelola fiskal yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Sigi telah mengadopsi prinsip penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), di mana setiap kegiatan harus memiliki indikator *output* dan *outcome* yang terukur. Namun, tantangan muncul pada tahap pelaksanaan dan pengawasan. Kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Keterbatasan kompetensi aparatur dalam perencanaan dan pelaporan anggaran menyebabkan proses administrasi menjadi lambat dan kurang optimal. Upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan keuangan daerah dan penggunaan sistem digital seperti SIPD perlu terus diperkuat agar tata kelola keuangan dapat berjalan lebih profesional dan akuntabel.

Dengan demikian, meskipun regulasi telah menyediakan kerangka hukum yang kuat, efektivitas implementasinya masih bergantung pada kemampuan kelembagaan dan komitmen Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi. Reformasi tata kelola keuangan dan peningkatan koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan belanja daerah benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

---

<sup>16</sup> Haga, R., Nugroho, S., Bancin, J.B., & Christmas, A.F (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Terhadap Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah*

#### **d. Penelitian Terdahulu**

Analisis hubungan antara pengelolaan belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sigi sejalan dengan hasil sejumlah penelitian terdahulu yang menyoroti efektivitas kebijakan fiskal daerah. Aithan, I., dkk. (2025): menunjukkan bahwa efisiensi belanja daerah dan akuntabilitas fiskal menjadi indikator utama kinerja keuangan daerah. Anugrahwaty,.N, menyatakan bahwa Daerah perlu melakukan evaluasi kinerja anggaran secara rutin, meningkatkan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil, dan memperkuat sistem pengawasan internal.<sup>17</sup>

Putra,.E, menunjukkan bahwa integrasi prinsip keberlanjutan dalam belanja publik mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang.<sup>18</sup> Shadewi, E.R. menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan fiskal. Dalam konteks Kabupaten Sigi, sinergi ini terwujud melalui transfer dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Sari Y.P (2025), efektivitas dana transfer ini bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.

Pangemanan, S. memperkuat argumentasi bahwa sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian,

---

<sup>17</sup> Anugrahwaty, N., (2022). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Mamuju* (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin

<sup>18</sup> Putra, E., Pratama, I.N., Ningrum, S.D.S., Fitrianiingsih, Lestari, N., Azhari, M.A., Aslan, M., Agung Putra Sarkila, A.P., & Putri Kartika, P., (2025). *Implementasi Kebijakan Fiskal Hijau Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara: Peluang Dan Tantangan Untuk Transisi Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia*. Nusantara Hasana Journal, Volume 4 No. 9 (Februari 2025), Page: 39-51

peningkatan kapasitas aparatur dan modernisasi sistem informasi keuangan menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Sigi. Serta Amri, H.AH menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, yaitu pemerintah perlu fokus pada optimalisasi belanja daerah agar lebih produktif dan berdampak luas terhadap pelayanan publik dan pembangunan.<sup>19</sup>

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan belanja daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas fiskal. Oleh karena itu, strategi peningkatan efektivitas belanja daerah di Kabupaten Sigi perlu difokuskan pada penguatan perencanaan berbasis hasil, peningkatan porsi belanja modal, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program.

#### **e. Implikasi dan Evaluasi**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Sigi memiliki kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun belum optimal. Efektivitas belanja daerah sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara belanja rutin dan belanja produktif, serta kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran. Dalam jangka panjang, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi memerlukan kebijakan belanja publik yang lebih strategis dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>19</sup> Supartoyo, Yesi Hendriani; Tatuh, Jen; and Sendouw, Recky H. E. (2013) "The Economic Growth and the Regional Characteristics: The Case of Indonesia," Bulletin of Monetary Economics and Banking: *"Todaro dan Smith (2015)"* Vol. 16: No. 1

Pemerintah daerah perlu memperkuat peran belanja modal dalam membiayai sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal dan akuntabilitas fiskal harus menjadi prioritas utama agar setiap rupiah anggaran publik dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Implementasi regulasi seperti PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan kondisi dan kapasitas daerah. Pemerintah Kabupaten Sigi juga perlu memanfaatkan peluang dari UU HKPD No. 1 Tahun 2022 untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui diversifikasi sumber PAD. Pendekatan inovatif dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti *digital budgeting* dan penggunaan aplikasi berbasis kinerja, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengelolaan belanja daerah yang baik akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kabupaten Sigi perlu memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, kelembagaan, dan partisipasi publik untuk memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah di Kabupaten Sigi telah menjadi instrumen utama dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun masih menghadapi kendala struktural dan kelembagaan. Upaya peningkatan efektivitas pengelolaan APBD melalui reformasi fiskal, penguatan regulasi, dan perbaikan tata kelola keuangan merupakan langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan

---

<sup>20</sup> Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi “*Pencegahan Inefisiensi dan Inefektivitas Anggaran Rp 392 Triliun Bukan Kebocoran*”

## **2. Kontribusi Belanja Daerah pada Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sigi**

Belanja daerah merupakan instrumen fiskal utama pemerintah daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Sigi, kontribusi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dipahami melalui keterkaitan antara alokasi belanja dalam APBD dengan dinamika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan belanja daerah selama periode 2021–2024 menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pemulihan ekonomi pascabencana dan pandemi.<sup>21</sup>

Secara empiris, struktur belanja daerah Kabupaten Sigi masih didominasi oleh belanja operasi, khususnya belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Dominasi belanja operasi tersebut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi terutama melalui mekanisme peningkatan daya beli aparatur dan perputaran ekonomi jangka pendek di tingkat lokal. Pembayaran gaji, pengadaan barang dan jasa, serta belanja pelayanan publik berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan menopang aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor perdagangan dan jasa. Namun demikian, kontribusi belanja operasi terhadap pertumbuhan ekonomi cenderung bersifat tidak langsung dan berjangka pendek, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi daerah masih terbatas.

Di sisi lain, belanja modal memiliki peran yang lebih strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan

---

<sup>21</sup> Jdih “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah”.

panjang. Alokasi belanja modal di Kabupaten Sigi selama periode penelitian menunjukkan fluktuasi, namun mengalami peningkatan pada tahun-tahun tertentu seiring dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi daerah. Belanja modal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas pelayanan publik, serta sarana pendukung kegiatan ekonomi berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah. Dengan demikian, belanja modal berperan sebagai investasi publik yang memperkuat kapasitas produksi dan daya saing ekonomi Kabupaten Sigi.<sup>22</sup>

Kontribusi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi juga dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan belanja, efektivitas penyerapan anggaran, serta ketepatan sasaran program menjadi faktor penentu dalam menghasilkan dampak ekonomi yang optimal. Meskipun total belanja daerah cenderung meningkat, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi selama periode 2022–2024 menunjukkan kecenderungan stabil namun belum mengalami akselerasi yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada *output* dan *outcome* pembangunan ekonomi.

Belanja transfer, khususnya transfer ke desa, turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Dana transfer yang dikelola secara efektif dapat mendorong pembangunan

---

<sup>22</sup> Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi.

infrastruktur desa, pengembangan usaha ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dalam konteks Kabupaten Sigi yang memiliki karakteristik wilayah perdesaan yang kuat, belanja transfer berpotensi menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Namun demikian, kontribusi belanja transfer sangat bergantung pada kapasitas pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara produktif.<sup>23</sup>

Belanja tidak terduga juga memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi kondisi darurat dan bencana. Meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat tidak langsung, keberadaan belanja tidak terduga memungkinkan pemerintah daerah merespons guncangan ekonomi dan sosial secara cepat, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, kontribusi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa belanja daerah telah berperan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi, namun dampaknya terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi masih relatif terbatas. Kondisi ini menegaskan bahwa besarnya belanja daerah belum secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diimbangi dengan kualitas pengelolaan belanja yang baik. Oleh karena itu, optimalisasi kontribusi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi memerlukan pergeseran orientasi belanja ke arah belanja yang lebih produktif, peningkatan porsi belanja modal yang strategis, serta penguatan perencanaan

---

<sup>23</sup> Pangemanan, S. (2024). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dimoderasi Budaya Organisasi* (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin

dan pengawasan anggaran agar belanja daerah benar-benar mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

### **Keterbatasan Penelitian**

#### **a. Keterbatasan Data Sekunder dan Periode Analisis**

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan APBD Kabupaten Sigi, dan beberapa publikasi resmi pemerintah daerah. Keterbatasan muncul karena tidak semua data tersedia secara lengkap dan konsisten untuk setiap tahun, terutama pada komponen belanja modal dan indikator pertumbuhan sektoral. Hal ini menyebabkan analisis yang dilakukan hanya mampu menggambarkan tren umum dan hubungan korelatif antar variabel tanpa mampu menelusuri hubungan kausal secara mendalam. Selain itu, periode analisis yang relatif singkat (2021–2024) juga membatasi kemampuan penelitian untuk melihat dampak jangka panjang dari kebijakan pengelolaan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Fluktuasi akibat faktor eksternal seperti pandemi *Covid-19* dan bencana alam di Sigi dapat memengaruhi hasil, namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam model analisis. Akibatnya, generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan secara hati-hati, terutama jika diterapkan pada konteks waktu yang berbeda.

#### **b. Keterbatasan dalam Pendekatan Metodologis**

Metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif sederhana menjadikan hasilnya lebih bersifat eksploratif daripada inferensial. Penelitian ini belum menggunakan pendekatan ekonometrik yang lebih kompleks seperti regresi panel data atau model simultan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan ini berimplikasi pada kedalaman analisis, karena hubungan antara belanja operasi, belanja modal, dan pertumbuhan



ekonomi belum dapat dijelaskan secara statistik mendalam. Selain itu, penelitian ini belum mengintegrasikan indikator sosial seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan sebagai variabel kontrol yang dapat memperkuat validitas hasil. Padahal, indikator-indikator tersebut memiliki hubungan erat dengan efektivitas belanja publik. Dengan demikian, hasil penelitian lebih menggambarkan arah kecenderungan makro tanpa menelusuri dinamika struktural yang lebih kompleks dalam perekonomian daerah.<sup>24</sup>

### **c. Keterbatasan pada Aspek Kelembagaan dan Implementatif**

Analisis penelitian masih terbatas pada level kebijakan umum dan belum mengkaji secara mendalam mekanisme internal pengelolaan belanja di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Aspek kelembagaan seperti koordinasi antar-OPD, kapasitas SDM, dan sistem pengendalian internal hanya dibahas secara deskriptif tanpa pengukuran kinerja yang terstandar. Akibatnya, penelitian belum mampu mengidentifikasi secara kuantitatif sejauh mana kelembagaan memengaruhi efektivitas belanja daerah. Selain itu, penelitian ini juga belum mengevaluasi implementasi kebijakan fiskal di lapangan melalui observasi langsung atau wawancara mendalam. Ketidakhadiran data primer membuat penelitian kurang menggambarkan kondisi faktual seperti hambatan birokrasi, keterlambatan penyerapan anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran. Oleh karena itu, hasil penelitian ini sebaiknya dipandang sebagai dasar awal untuk penelitian lanjutan yang lebih terfokus pada aspek kelembagaan dan manajerial.

---

<sup>24</sup> Pangemanan, S. (2024). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dimoderasi Budaya Organisasi* (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin.

#### **d. Keterbatasan dalam Generalisasi Hasil**

Karakteristik Kabupaten Sigi sebagai daerah pascabencana dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat membuat hasil penelitian ini sulit digeneralisasi untuk daerah lain dengan kondisi fiskal yang berbeda. Struktur ekonomi Sigi yang didominasi sektor pertanian dan jasa juga memengaruhi efektivitas belanja daerah terhadap pertumbuhan, yang mungkin tidak berlaku di daerah industri atau perkotaan. Selain itu, variasi dalam kapasitas fiskal, sistem pengawasan, dan tata kelola pemerintahan antar-daerah menimbulkan perbedaan signifikan dalam respons terhadap kebijakan belanja. Dengan demikian, hasil penelitian ini lebih tepat digunakan sebagai studi kasus kontekstual yang memberikan gambaran empiris, bukan model universal yang dapat diterapkan secara langsung pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia.<sup>25</sup>

#### **e. Keterbatasan pada Aspek Dinamika Eksternal dan Kebijakan Nasional**

Penelitian ini belum mempertimbangkan secara komprehensif pengaruh kebijakan fiskal nasional, seperti perubahan regulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), terhadap kemampuan fiskal daerah. Dinamika ekonomi makro seperti inflasi nasional, kebijakan suku bunga, serta fluktuasi harga komoditas juga belum diintegrasikan ke dalam analisis. Padahal, faktor-faktor eksternal tersebut berpotensi besar memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengefektifkan belanja publik. Dengan tidak dimasukkannya variabel eksternal tersebut, hasil penelitian cenderung menggambarkan pengaruh internal (intra-daerah) tanpa

---

<sup>25</sup> Pemerintah Kabupaten Sigi. (2023). "*Profil Kabupaten Sigi*". Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

menelusuri keterkaitan sistemik dengan kebijakan fiskal nasional. Implikasi dari keterbatasan ini adalah perlunya penelitian lanjutan dengan pendekatan multitingkat (multi-level fiscal analysis) agar hubungan antara kebijakan pusat dan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan secara utuh.<sup>26</sup>

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan belanja daerah serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sigi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Sigi secara umum telah mengikuti kerangka regulasi yang berlaku; khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Tahapan pengelolaan belanja daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara prosedural. Namun demikian, dari perspektif kualitas belanja, pengelolaan belanja daerah masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (output dan outcome), terutama dalam mendukung peningkatan kapasitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.
- 2) Kontribusi belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sigi cenderung bersifat positif namun belum optimal; Peningkatan belanja daerah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa besaran belanja daerah bukan satu-satunya faktor penentu pertumbuhan ekonomi, melainkan

---

<sup>26</sup> Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi.

kualitas pengelolaan dan arah alokasi belanja menjadi faktor yang lebih menentukan. Belanja daerah yang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rutin pemerintahan menyebabkan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah relatif terbatas.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah di Kabupaten Sigi telah berjalan secara administratif dan normatif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas belanja dan orientasi pembangunan ekonomi, agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

## **F. SARAN**

### **1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan belanja daerah dengan menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Secara khusus, pemerintah daerah perlu melakukan penataan komposisi belanja dengan mengurangi dominasi belanja operasi dan secara bertahap meningkatkan porsi belanja modal yang bersifat produktif dan berdaya ungkit tinggi terhadap perekonomian daerah, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penguatan sektor pertanian, UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti pendekatan kuantitatif atau mixed methods, guna menguji secara empiris hubungan antara jenis belanja daerah dan

pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas periode pengamatan atau menambah variabel lain, seperti investasi swasta, kualitas infrastruktur, tingkat kemiskinan, dan penyerapan tenaga kerja, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kajian komparatif antar kabupaten/kota dengan karakteristik yang berbeda juga dapat dilakukan untuk melihat variasi efektivitas pengelolaan belanja daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kebijakan fiskal daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aithan, I., Frinaldi, A., Putri, N.E, & Asnil (2025). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Berdasarkan APBD Tahun 2024*. Jurnal Ekonomi dan Administrasi Modern, Vol. 9, No. 2, Mei 2025.
- Amri, H.A.H., (2022). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010–2020*. (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin.
- Anugrahwaty, N., (2022). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Mamuju* (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin.
- Asia, R.P., dkk (2024). Pengaruh PDRB Dan Usia Produktif Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Era Bonus Demografi. “*Arsyad 2010*”. INDEPENDENT: Journal Of Economics. Volume 04 Nomor 02, 2024 (Januari 2026)
- Astuti, I. (2024). *Analisis peluang dan tantangan praktik desentralisasi penguatan otonomi di Kabupaten Kediri*.

- Haga, R., Nugroho, S., Bancin, J.B., & Christmas, A,F (2024). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Terhadap Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah*.
- Jdih “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah”.
- Kemenkeu Learning Center “Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”.
- Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi “Pencegahan Inefisiensi dan Inefektivitas Anggaran Rp 392 Triliun Bukan Kebocoran”
- Kurniawan, A. (2025). *Apakah Inflasi, Pendapatan Pajak Daerah, dan Pengeluaran Pemerintah Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi? Analisis Makroekonomi di Pulau Jawa* (Juli 2025)
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi.
- Oates, W. E. (1999). *An Essay on Fiscal Federalism. Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Pangemanan, S. (2024). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dimoderasi Budaya Organisasi* (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin.
- Pemerintah Kabupaten Sigi. (2023). “*Profil Kabupaten Sigi*”. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.
- Putra, E., Pratama, I.N., Ningrum, S.D.S., Fitriyaningsih, Lestari, N., Azhari, M.A., Aslan, M., Agung Putra Sarkila, A.P., & Putri Kartika, P., (2025). *Implementasi Kebijakan Fiskal Hijau Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara: Peluang Dan Tantangan Untuk Transisi Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia*. Nusantara Hasana Journal, Volume 4 No. 9 (Februari 2025), Page: 39-51

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Supartoyo, Yesi Hendriani; Tatu, Jen; and Sendouw, Recky H. E. (2013) "The Economic Growth and the Regional Characteristics: The Case of Indonesia," *Bulletin of Monetary Economics and Banking: "Todaro dan Smith (2015)"* Vol. 16: No. 1.